

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robbil'alamin , Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 atas pelaksanaan tahun 2021 selesai disusun.

Salah satu Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah menurunnya angka kemiskinan. Dalam rangka menurunkan angka dan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaporan dan pemantauan program-program pengentasan kemiskinan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

Kami menyadari, dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, masukan dan kritikan konstruktif sangat diperlukan dalam perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan lintas sektoral dalam merumuskan kebijakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Curup, Mei 2022
WAKIL BUPATI REJANG LEBONG
Selaku Ketua TKPKD Kab. RL,

HENDRA WAHYUDIANSYAH, S.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i-1
Daftar Isi	i-2
Daftar Tabel.....	i-4
Daftar Grafik.....	i-5
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Maksud dan Tujuan	1-2
1.3 Landasan Hukum.....	1-2
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-3
Bab II Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	
2.1 Kelembagaan TKPK.....	2-1
2.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	2-2
2.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan.....	2-2
2.3.1 Analisis APBD.....	2-2
2.3.1.1 Gambaran Umum Keuangan Daerah	2-2
2.3.1.2 Rasio PAD.....	2-5
2.3.1.3 Rasio Bagi Hasil	2-6
2.3.1.4 Rasio Transfer.....	2-7
2.3.1.5 Rasio DAU dan DAK	2-8
2.3.1.6 Rasio Belanja Pegawai.....	2-8
2.3.1.7 Rasio Modal.....	2-9
2.3.2 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021.....	2-10
2.4 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.....	2-10
2.5 Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	2-11
2.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	2-11
Bab III Capaian dan Analisis	
3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan	3-1
3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan.....	3-21
3.2.1 Capaian Kinerja Kemiskinan Konsumsi	3-21
3.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin	3-21
3.2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin	3-25

3.2.1.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3-27
3.2.1.4	Indeks Keparahan Kemiskinan	3-29
3.2.1.5	Garis Kemiskinan.....	3-32
3.2.2	Analisis Keterkaitan Kondisi Umum Kemiskinan Konsumsi.....	3-34
3.3	Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan.....	3-37
Bab IV Rencana Tindak Lanjut		4-1
Bab V Penutup		
5.1	Kesimpulan.....	5-1
5.2	Rekomendasi	5-2
5.3	Saran	5-2

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 2.1	Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	2-3
Tabel 2.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan.....	2-6
Tabel 2.3	Rasio Pendapatan Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan.....	2-7
Tabel 2.4	Rasio Transfer Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan	2-7
Tabel 2.5	Rasio DAU terhadap Total Pendapatan.....	2-8
Tabel 2.6	Rasio DAK terhadap Total Pendapatan.....	2-8
Tabel 2.7	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Tranfer.....	2-9
Tabel 2.8	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Tranfer	2-10
Tabel 3.1	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 (Sumber Dana DAU dan DAK)	3-5
Tabel 3.2	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 (Sumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	3-17
Tabel 3.3	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 (Sumber Dana Non Pemerintah)	3-19
Tabel 3.4	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 (Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	3-20
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong.....	3-21
Tabel 3.6	Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Konsumsi.....	3-34
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kemiskinan Konsumsi pada tahun 2021.....	3-37
Tabel 3.8	Capaian program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.....	3-38

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 3.1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%).....	3-22
Grafik 3.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%).....	3-21
Grafik 3.3 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%)	3-23
Grafik 3.4 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%)	3-23
Grafik 3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin.....	3-21
Grafik 3.6 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (jiwa).....	3-25
Grafik 3.7 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa).....	3-25
Grafik 3.8 Perkembangan Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa).....	3-26
Grafik 3.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3-27
Grafik 3.10 Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1).....	3-27
Grafik 3.11 Analisis Efektivitas indeks kedalaman kemiskinan (P1).....	3-28
Grafik 3.12 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3-29
Grafik 3.13 Perkembangan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)	3-29
Grafik 3.14 Posisi Relatif Indeks Kearifan Kemiskinan (P2).....	3-30
Grafik 3.15 Analisa Efektivitas Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)	3-31
Grafik 3.16 Perkembangan Relevansi Indeks Kearifan Kemiskinan (P2)	3-31
Grafik 3.17 Perkembangan Garis Kemiskinan.....	3-32
Grafik 3.18 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong.....	3-32
Grafik 3.19 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp)	3-33
Grafik 3.20 Analisis Prioritas Intervensi Bidang	3-34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda sedangkan secara kualitatif pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia tidak layak.

Kemiskinan merupakan persolan pembangunan yang dihadapi di seluruh dunia dan mendapat perhatian khusus, hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki dampak sosial yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan sudah menjadi isu global, bahkan pengentasan kemiskinan sudah ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang harus dicapai oleh semua Negara termasuk di Indonesia, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik ditingkat pusat maupun daerah tidak hanya merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah saja namun juga melibatkan dunia usaha, LSM serta pihak terkait lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi, hal ini dikarenakan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan melainkan juga berkaitan dengan beberapa hal, antara lain;

1. Kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin.
2. Terpenuhi atau tidaknya hak-hak dasar warga.
3. Perlakuan terhadap seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara martabat.

Upaya penurunan angka kemiskinan di daerah sangat bergantung pada komitmen, program, kegiatan dan pendanaan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam melaksanakan pengendalian, sinkronisasi, harmonisasi dan pemantuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan diperlukan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Laporan ini diperlukan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi kemiskinan dan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dimaksudkan untuk:

1. Memberikan informasi kepada TNP2K dan TKPK Provinsi Bengkulu tentang program kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Memberikan gambaran yang menyeluruh tentang program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong kepada pemangku kepentingan.
3. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.

Adapun penyusunan laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 bertujuan untuk:

1. Menegaskan komitmen dari berbagai lembaga baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun organisasi non pemerintah serta pihak-pihak lain yang peduli dalam hal penanggulangan kemiskinan.
2. Membangun kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan pemenuhan hak-hak dasar.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

1. Pasal (34) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.480.XI Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021, sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Bab II. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

- 2.1 Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan
- 2.2 Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
- 2.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 2.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk Penanggulangan Kemiskinan

Bab III. Capaian dan Analisis

- 3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan
- 3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Bab IV. Rencana Tindak Lanjut

- 4.1 Kelembagaan TKPKD
- 4.2 Koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan

Bab V. Penutup

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi

BAB 2

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.1 Kelembagaan TKPK

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.480.XI tahun 2021. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota.

Tim Koordinasi penanganan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Fungsi

- Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kabupaten/kota;
- Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
- Koordinasi pelaksanaan program bidang penanganan kemiskinan;
- Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/walikota.

2.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2021 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Menghadiri rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Rejang Lebong
2. Koordinasi penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

2.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

2.3.1 Analisis APBD

2.3.1.1 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan

cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel 2.1
Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2020 dan 2021

No.	Uraian	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN			
01.01	Pendapatan Asli Daerah	69.190.495.179	69.785.794.623	0,0086
01.01.01	Pendapatan pajak daerah	13.683.226.133	14.746.102.795	0,0777
01.01.02	Pendapatan Retribusi daerah	1.883.767.824	2.373.989.650	0,2602
01.01.03	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.789.389.099	2.158.663.422	0,2064
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	51.834.112.123	50.507.038.755	-0,0256
01.02	Pendapatan Transfer	883.069.152.972	903.981.624.728	0,0237
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	736.291.503.291	730.518.465.300	-0,0078
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak	8.513.397.608	19.253.675.091	1,2616
1.2.2.2	Dana bagi hasil sumber daya alam	6.981.101.856	-	
1.2.2.3	Dana alokasi umum	563.983.329.000	553.778.571.000	-0,0181
1.2.2.4	Dana alokasi khusus	156.813.674.827	58.322.650.202	-0,6281
	Dana Alokasi Khusus non fisik		99.163.569.007	
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	130.705.575.200	128.494.897.600	-0,0169
1.2.2.1	Dana otonomi khusus			
1.2.2.2	Dana penyesuaian (DID)	18.029.763.000	15.951.233.000	-0,1153
1.2.2.3	Dana Desa	112.675.812.200	112.543.664.600	-0,0012

01.02.03	Transfer Pemerintah Provinsi	16.072.074.481	44.968.261.828	1,7979
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	11.544.377.238	44.968.261.828	2,8953
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya	4.527.697.243	-	
01.03	Lain-lain Pendapatan yang Sah	46.305.067.577	36.277.357.000	-0,2166
01.03.01	Pendapatan hibah	38.653.767.577	36.277.357.000	-0,0615
01.03.02	Pendapatan dana darurat	7.651.300.000	-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	998.564.715.728	1.010.044.776.351	0,0115
2	BELANJA			
02.01	Belanja Operasi	731.286.606.727	716.109.013.207	-0,0208
02.01.01	Belanja pegawai	419.337.862.301	470.435.686.677	0,1219
02.01.02	Belanja barang	264.151.816.221	197.956.419.233	-0,2506
02.01.03	Bunga	-	-	
02.01.04	Subsidi	-	-	
02.01.05	Hibah	47.584.163.205	47.716.907.297	0,0028
02.01.06	Bantuan sosial	212.765.000	-	
02.02	Belanja Modal	84.679.969.727	104.031.642.891	0,2285
02.02.01	Belanja tanah	127.357.000	1.593.000.000	11,5081
02.02.02	Belanja peralatan dan mesin	30.612.739.440	18.579.741.516	-0,3931
02.02.03	Belanja gedung dan bangunan	34.058.178.303	31.361.987.963	-0,0792
02.02.04	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	18.046.448.733	52.274.113.412	1,8966
02.02.05	Belanja aset tetap lainnya	1.835.246.251	222.800.000	-0,8786
02.02.06	Belanja aset lainnya			
02.03	Belanja Tak Terduga	46.955.885.698	6.680.156.229	-0,8577
02.03.01	Belanja tak terduga	46.955.885.698	6.680.156.229	-0,8577
	JUMLAH BELANJA	862.922.462.152	826.820.812.327	-0,0418
3	TRANSFER			
03.01	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa	0		
03.01.01	Bagi hasil pajak	0		
03.01.02	Bagi hasil retribusi	0		

03.01.03	Bagi hasil pendapatan lainnya	0		
03.02	Transfer Bantuan Keuangan	170.994.062.900	169.385.746.000	-0,0094
03.02.01	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	-		
03.02.02	Transfer bantuan keuangan ke desa	170.994.062.900	169.385.746.000	-0,0094
03.02.03	Transfer bantuan keuangan lainnya	-		
	JUMLAH TRANSFER	170.994.062.900	169.385.746.000	-0,0094
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.033.916.525.052	996.206.558.327	-0,0365
4	PEMBIAYAAN			
04.01	Penerimaan Pembiayaan	39.165.537.325	3.810.266.535	-0,9027
04.01.01	Penggunaan SiLPA	39.165.537.325	3.810.266.535	-0,9027
04.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	1.789.389.099	
04.02.01	Pembentukan dana cadangan	-		
04.02.02	Penyertaan modal pemerintah daerah	-	1.789.389.099	
04.02.03	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri	-		
	PEMBIAYAAN NETTO	39.165.537.325	2.020.877.436	-0,9484

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.2 Rasio PAD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Sumber pendapatan daerah antara lain, meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- 2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
- 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tingkat kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Kedua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah begitu juga sebaliknya semakin tinggi rasio transfer menunjukkan semakin rendah kemandirian suatu daerah.

Rasio PAD Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 6,91 persen, lebih rendah 0,2 persen dari tahun 2020. Penurunan rasio PAD disebabkan oleh target lain-lain PAD yang sah tidak memenuhi target dikarenakan pandemi *covid-19*. Meskipun demikian komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 seperti; pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan cenderung meningkat dari tahun 2020 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,18 persen.

Tabel 2.2

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio PAD
		PAD	Total Pendapatan	(a)/(b)*100
		(a)	(b)	
1	2020	69.190.495.179	998.564.715.728	6,93 %
2	2021	69.785.794.623	1.010.044.776.351	6,91%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.3 Rasio Bagi Hasil

Komponen bagi hasil merupakan bagian dari dana transfer atau dana perimbangan yaitu selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Rasio bagi hasil Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebesar 0,44 persen, angka ini lebih rendah 1,11 persen dari tahun 2020 (1,55 persen), namun secara umum

peningkatan bagi hasil pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya dengan tingkat pertumbuhan 1,26 persen.

Tabel 2.3
Rasio Pendapatan Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio Bagi Hasil
		Pendapatan Bagi Hasil	Total Pendapatan	
		(a)	(b)	(a)/(b)*100
1	2020	15.494.499.464	998.564.715.728	1,55%
2	2021	19.253.675.091	1.010.044.776.351	0,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.4 Rasio Tranfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana ang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Rasio transfer menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat.

Pada tahun 2021 rasio transfer Kabupaten Rejang Lebong sebesar 89,50 persen. Angka ini lebih tinggi 1,07 persen dibandingkan tahun 2020 (88,43%). Semakin tinggi rasio tranfer menunjukkan semakin besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat.

Tabel 2.4
Rasio Transfer Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio Tranfer
		Total Tranfer	Total Pendapatan	
		(a)	(b)	(a)/(b)*100
1	2020	883.069.152.972	998.564.715.728	88,43
2	2021	903.981.624.728	1.010.044.776.351	89,50

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.5 Rasio DAU dan DAK

Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) merupakan komponen dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Rasio DAU dan DAK Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebesar 54,83 persen dan 15,59 persen, sedangkan pada tahun 2020 rasio DAU dan DAK Kabupaten Rejang Lebong sebesar 56,48 persen dan 15,70.

Penurunan rasio DAU dan DAK terjadi hampir merata di Provinsi dan Kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal rendah, hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat yang masih fokus dalam upaya pengentasan *covid-19* di sejumlah wilayah.

Tabel 2.5

Rasio DAU terhadap Total Pendapatan

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio DAU terhadap Total Pendapatan
		DAU	Total Pendapatan	(a)/(b)*100
		(a)	(b)	
1	2020	563.983.329.000	998.564.715.728	56,48%
2	2021	553.778.571.000	1.010.044.776.351	54,83%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

Tabel 2.6

Rasio DAK terhadap Total Pendapatan

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio DAK terhadap Total Pendapatan
		DAK	Total Pendapatan	(a)/(b)*100
		(a)	(b)	
1	2020	156.813.674.827	998.564.715.728	15,70%
2	2021	157.486.219.209	1.010.044.776.351	15,59%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.6 Rasio Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja pegawai merupakan belanja bersifat mengikat. Berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasi oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Rasio belanja pegawai di Kabupaten Rejang Lebong terhadap belanja daerah tahun 2021 sebesar 47,22 persen, angka ini lebih tinggi 6,66 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 (40,56 persen). Kenaikan belanja pegawai disebabkan oleh kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan bantuan isentif bagi petugas medis dalam rangka penanganan *covid-19*.

Tabel 2.7
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Tranfer

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio Belanja Pegawai (a)/(b)*100
		Belanja Pegawai	Total Belaja dan Tranfer	
		(a)	(b)	
1	2020	419.337.862.301	1.033.916.525.052	40,56%
2	2021	470.435.686.677	996.206.558.327	47,22%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.1.7 Rasio Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Semakin tinggi rasio modal terhadap belanja daerah mengindikasikan semakin tinggi tingkat kegiatan pembangunan disuatu daerah, begitu pula sebaliknya.

Rasio modal di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebesar 10,44 persen, lebih tinggi 2,25 persen dari tahun 2020 (8,19 persen). Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan masih menjadi fokus utama kegiatan pembangunan pada tahun 2021.

Tabel 2.8

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Transfer

No	Tahun Anggaran	Uraian		Rasio Belanja Modal
		Belanja Modal	Total Belanja dan Transfer	
		(a)	(b)	(a)/(b)*100
1	2020	84.679.969.727	1.033.916.525.052	8,19%
2	2021	104.031.642.891	996.206.558.327	10,44%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.3.2 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021

Anggaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebagai berikut:

Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Rejang Lebong		%	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2020	243.887.497.908,-	217.857.310.878,-	89,33	
2021	216.345.283.987,-	191.601.809.712,-	88,59	

Sumber: OPD Kab. Rejang Lebong, data di olah

2.4. Hambatan dan tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan memerlukan perhatian dari berbagai pihak/ lintas sektor, hal ini dikarenakan kompleksitas masalah yang harus ditangani. Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. Kurang berfungsinya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
3. Masih rendahnya capaian verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
4. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Belum efektifnya lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan desa;
6. Masih rendahnya investasi di daerah.

2.5. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya sekretariat pengaduan, sehingga pengaduan masyarakat belum tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan E-Lapor untuk menangani pengaduan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan.

2.6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam menentukan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

BAB III

CAPAIAN DAN ANALISIS

3.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan visi Kepala daerah Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif;
2. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat;
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah;
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima;
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan;
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program-program solutif;
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif

Adapun penjabaran misi tersebut sebagai berikut:

Penjabaran Misi 1 : Sebagaimana Program Nasional yang memprioritaskan pentingnya Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dijawantahkan dalam

program "Revolusi' Mental", membangun Karakter Masyarakat sangatlah penting guna menghadapi kompetisi global serta meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat. Karakter masyarakat yang kompetitif dan inovatif akan melahirkan kepedulian sosial masyarakat terhadap ikhtiar bersama dalam mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Rejang Lebong.

Penjabaran Misi 2 : Memantapkan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama dalam mewujudkan masyarakat yang religius merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan akan membentuk tatanan pemerintahan dan masyarakat yang bersih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penjabaran Misi 3 : Pendidikan merupakan indikator utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari aksesibilitas serta kualitas pendidikan yang dimiliki. Usaha peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan meliputi pemerataan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Keberpihakan Pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud investasi jangka panjang dalam pembangunan daerah yang akan melahirkan generasi emas.

Penjabaran Misi 4 : Kualitas pelayanan kesehatan akan direpresentasikan dengan usaha perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kemudahan akses ke fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, serta pemerataan layanan kesehatan ke seluruh Kabupaten Rejang Lebong.

Penjabaran Misi 5 : Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang beragam merupakan identitas daerah yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya daerah yang dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga harus dipertahankan eksistensinya melalui pelestarian budaya.

Penjelasan Misi 6 : Birokrasi (pemerintahan) merupakan poros dari pembangunan daerah sehingga sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi, menyelenggarakan pemerintahan yang *good governance*, menghadirkan kepemimpinan yang humanis dan aspiratif, membangun ruang keterlibatan terkait kebijakan publik, serta pengelolaan anggaran dengan lebih transparan, efektif dan efisien.

Penjelasan Misi 7 : Rejang Lebong merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Provinsi Bengkulu yang memiliki banyak objek wisata potensial sekaligus sebagai daerah pertanian yang memiliki beberapa komoditas unggulan, antara lain kopi, gula aren dan tanaman hortikultura lainnya membutuhkan langkah strategis dan berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan setiap potensi yang ada. Pengembangan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong harus dilaksanakan secara holistik dengan mempertimbangkan seluruh aspek pendukung, seperti sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas, pelaku usaha wisata yang berkompeten, dan melaksanakan event-event yang berkaitan dengan kepariwisataan. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian dilaksanakan berbasis kawasan dengan membangun sistem hilirisasi guna meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat petani. Pengembangan ekonomi kreatif tidak kalah penting untuk menjadi perhatian guna mendukung kegiatan pariwisata dan pertanian di era digital yang dihadapi saat ini. Pengembangan pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif yang terintegrasi akan mampu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Penjelasan Misi 8 : Minimnya ketersediaan lapangan kerja merupakan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan beberapa program solutif yang dapat menjawab tantangan ini, beberapa diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan pihak swasta (investor) dan meningkatkan kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rejang Lebong guna mendapatkan suntikan dana untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja.

Penjelasan Misi 9 : infrastruktur sebagai sarana pendukung dalam percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat sangatlah penting untuk dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif. Infrastruktur yang integratif dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua program-program prioritas lainnya, misalnya pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas proses produksi petani. Pembangunan secara kolaboratif merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh *stakeholder* dengan mengedepankan musyawarah berdasarkan skala prioritas.

Mengingat kompleksitas dimensi kemiskinan, maka program pengentasan kemiskinan dan pendanaanya dilaksanakan secara simultan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebagaimana tercantum berikut:

Tabel 3.1
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
(Sumber Dana DAU dan DAK)

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2021					OPD Pelaksana
			Anggaran	Realisasi		Realisasi	%	
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa/Modal			
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.822.300.700	100.640.000	9.591.761.774	9.692.401.774	99	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	250.990.800	8.760.000	222.225.150	230.985.150	92	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.239.939.276	18.120.000	22.667.393.897	22.685.513.897	80	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.154.396.200	46.000.000	3.001.341.100	3.047.341.100	97	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	175.849.250	12.000.000	162.126.200	174.126.200	99	

		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.406.605.808	48.000.000	12.697.728.686	12.745.728.686	83	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	60.000.000		60.000.000	60.000.000	100	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.000.000	6.600.000	142.950.000	149.550.000	100	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	454.488.980	10.880.000	437.006.980	447.886.980	99	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.511.203.200	28.440.000	2.480.225.600	2.508.665.600	100	
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1.711.425.375	49.450.000	1.552.666.448	1.602.116.448	94	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/ Kesetaraan	207.331.220	13.200.000	192.633.000	205.833.000	99	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	73.709.350	33.250.000	39.209.350	72.459.350	98	
		Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	100	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	544.380.000	9.600.000	534.780.000	544.380.000	100	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	3.429.968.080	112.800.000	3.197.784.400	3.310.584.400	97	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.599.470.206	-	1.509.041.000	1.509.041.000	94	
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2.226.000.000	-	2.132.703.260	2.132.703.260	96	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.120.000.000	-	2.114.640.000	2.114.640.000	100	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.432.608.604	6.200.000	3.359.185.818	3.365.385.818	98	
		Pengadaan Obat, Vaksin	1.361.932.476	-	1.343.754.044	1.343.754.044	99	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.249.724.768	48.040.000	1.186.470.606	1.234.510.606	99	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.621.452.000	-	4.514.074.750	4.514.074.750	98	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	600.000.000	-	598.738.891	598.738.891	100	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5.919.100.000	25.260.000	4.297.612.345	4.322.872.345	73	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Pengelolaan Jaminan Kesehatan	17.818.459.060	71.890.000	17.351.782.740	17.423.672.740	98	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	24.273.132.189	-	22.762.922.717	22.762.922.717	94	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.637.500	-	186.840.000	186.840.000	95	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	-	46.240.000	46.240.000	47	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.021.250	-	59.200.000	59.200.000	73	

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.452.000	-	124.880.000	124.880.000	100	
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	616.779.918	35.780.288	580.235.900	616.016.188	100	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	148.128.205	34.270.000	109.959.355	144.229.355	97	
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	126.923.945	24.470.000	88.119.795	112.589.795	89	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	180.556.950	18.930.000	155.831.700	174.761.700	97	
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	63.788.700	18.460.000	42.748.400	61.208.400	96	

Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	282.594.900	24.260.000	141.839.900	166.099.900	59	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	714.721.150	31.067.500	676.703.100	707.770.600	99	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.046.747.792	158.940.000	5.644.870.674	5.803.810.674	96	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	799.705.800	26.460.000	762.794.868	789.254.868	99	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.816.633.600	13.220.000	1.643.207.168	1.656.427.168	91	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.363.370.200	64.190.000	6.965.374.600	7.029.564.600	95	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.619.000.400	20.340.000	2.580.622.700	2.600.962.700	99	
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	874.787.468	33.920.000	728.473.800	762.393.800	87	
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	23.944.082.435	185.840.000	23.473.426.438	23.659.266.438	99	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.466.477.306	28.350.000	2.408.476.300	2.436.826.300	99	
		Pembangunan Jembatan	2.893.777.557	27.095.000	1.334.137.400	1.361.232.400	47	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	382.494.363	13.830.000	368.599.001	382.429.001	100	
Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	156.235.600	12.350.000	141.693.400	154.043.400	99	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.310.891.475	111.360.000	7.565.982.519	7.677.342.519	92	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	564.976.600	11.500.000	506.529.600	518.029.600	92	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Umum (PSU)								
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	49.028.800	8.140.000	40.438.800	48.578.800	99	Dinas Pariwisata ^a
Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	89.784.000	9.740.000	79.797.000	89.537.000	100	
Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerjasama antar desa	8.201.400	1.040.000	7.161.400	8.201.400	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	213.925.789	4.950.000	204.521.630	209.471.630	98	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.605.000	2.052.000	17.195.000	19.247.000	93	
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	5.233.100		5.233.100	5.233.100	100	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	12.555.000		12.555.000	12.555.000	100	
		Pemberian Layanan Rujukan	4.080.000		3.940.000	3.940.000	97	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68.384.150	3.600.000,00	65.587.900,00	69.187.900	101	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.620.400	8.160.000,00	189.626.400,00	197.786.400	98	
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	8.010.000		8.004.000	8.004.000	100	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.348.700		2.348.700	2.348.700	100	
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.960.000	750.000	1.960.000	2.710.000	138	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	390.304.000	12.580.000	360.103.850	372.683.850	95	
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	389.234.300	2.500.000	386.422.300	388.922.300	100	
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11.235.400	2.688.000	7.085.400	9.773.400	87	
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.588.008.700	43.200.000	1.466.561.700	1.509.761.700	95	
Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.284.100	7.200.000,00	63.065.000	70.265.000	96	

Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	335.100.790	17.760.000	301.451.070	319.211.070	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	192.046.000	21.240.000	148.860.600	170.100.600	89	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.101.240.000		706.468.900	706.468.900	64	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.705.820		29.224.500	29.224.500	53	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	253.375.180		206.633.650	206.633.650	82	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.076.278.200	10.540.000	1.063.959.450	1.074.499.450	100	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	361.829.250		350.610.000	350.610.000	97	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	760.560.000		746.084.500	746.084.500	98	
Program Pemerintah dan Kesra	Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	3.126.686.700	73.560.000	2.195.102.200	2.268.662.200	73	Bag. Kesejahteraan Rakyat
-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.857.661.553	0	4.870.799.500	4.870.799.500	41	BPKD selaku BUD
Jumlah			216.345.283.987	1.773.462.788	189.828.346.924	191.601.809.712		

Tabel 3.2
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
(Sumber Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)

Kecamatan	Jumlah desa/ Kel Total	Alokasi dari Total Desa di Kec	Realisasi						
			sarpras		Nonsarpras		Total		% DDS
			DDS	SDD	DDS	SDD	DDS	SDD	
Kota Padang	7	7.598.146.000	5.211.516.600	-	2.386.629.400	10.000.000	7.598.146.000	10.000.000	100,00 %
Padang Ulak Tanding	14	14.570.627.00 0	8.387.271.200	253.241.700	3.325.157.100	2.148.100	11.712.428.300	255.389.800	80,38%
Sindang Kelingi	9	7.045.863.000	4.695.714.574	317.790.200	1.717.728.100	6.500.000	6.413.442.674	324.290.200	91,02%
Bermani Ulu	12	10.525.788.00 0	6.842.058.350	-	2.769.150.250	65.754.300	9.611.208.600	65.754.300	91,31%
Selupu Rejang	13	11.354.684.00 0	7.957.953.550	55.985.200	2.883.020.951	226.162.172	10.840.974.501	282.147.372	95,48%
Curup Utara	12	9.994.243.000	6.807.797.960	152.745.100	2.796.244.840	38.271.500	9.604.042.800	191.016.600	96,10%
Curup Timur	5	4.141.416.000	3.239.783.200	-	871.425.600	-	4.111.208.800	-	99,27%
Curup Selatan	9	7.570.052.000	4.838.739.350	-	2.407.347.100	45.436.110	7.246.086.450	45.436.110	95,72%
Curup Tengah	1	805.756.000	591.290.000	-	214.466.000	-	805.756.000	-	100,00 %
Binduriang	5	4.746.519.000	3.783.648.000	-	925.012.800	3.896.100	4.708.660.800	3.896.100	99,20%
Sindang Beliti Ulu	9	10.171.586.00 0	8.579.676.200	407.673.500	1.535.244.800	-	10.114.921.000	407.673.500	99,44%
Sindang Dataran	6	5.198.932.000	3.823.913.400	-	1.296.043.260	7.500.000	5.119.956.660	7.500.000	98,48%

Sindang Beliti Ilir	10	10.500.845.000	7.159.276.400	-	1.818.173.150	41.390.000	8.977.449.550	41.390.000	85,49%
Bermani Ulu Raya	10	8.974.679.000	5.848.058.450	-	2.948.764.550	43.886.700	8.796.823.000	43.886.700	98,02%
Jumlah		113.199.136.000	77.766.697.234	1.187.435.700	27.894.407.901	490.944.982	105.661.105.135	1.678.380.682	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Tabel 3.3
 Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
 (Sumber Dana Non Pemerintah)

No	Program	Kegiatan	Penerima Manfaat	Anggaran	Pelaksana
1	Rejang Lebong Sehat	1. Bantuan pengobatan dhufa	133 orang	169.850.000	BAZNAS RL
		2. Bantuan pendamping pengobatan dhuafa	20 orang	9.050.000	
		3. Bantuan alat kesehatan	80 orang	126.500.000	
2	Rejang Lebong Cerdas	1. Bantuan pendidikan dhuafa	86 orang	86.600.000	
		2. Bantuan dhuafa	1.135 orang	318.000.000	
3	Rejang Lebong Peduli	1. Santuan dhuafa satu kali bantu	501 orang	117.650.000	
		2. Bantuan rehab rumah layak huni	1 orang	3.000.000	
		3. Bantuan bedah rumah layak huni (upah tukang)	3 orang	4.500.000	
		4. Bantuan tanggap bencana	36 orang	100.775.000	
		5. Bantuan orang terlantar	3 orang	1.700.000	
		6. Bantuan muallaf	4 orang	5.600.000	
4	Rejang Lebong Takwa	1. Bantuan guru ngaji	169 orang	43.250.000	
		2. Bantuan da'i	26 orang	91.550.000	
		3. Bantuan sarana dan prasarana ibadah	1 unit	5.000.000	
		4. Bantuan ormas islam dan syiar dakwah	17 orang	12.850.000	
5	Rejang Lebong Sejahtera	1. Bantuan alat usaha produktif	607 orang	699.500.000	
		2. Bantuan modal usaha produktif	77 orang	51.000.000	
			Jumlah	1.846.375.000	

Tabel 3.4
 Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
 (Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

No	Program	Penerima Manfaat	Anggaran (Rp)
1	Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	17.468 Jiwa	41.923.200.000,-
2	Program Keluarga Harapan	10.655 Jiwa	26.575.550.000,-

3.2 Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

3.2.1 Capaian Kinerja Kemiskinan Konsumsi

3.2.1.1 Persentase Penduduk Miskin

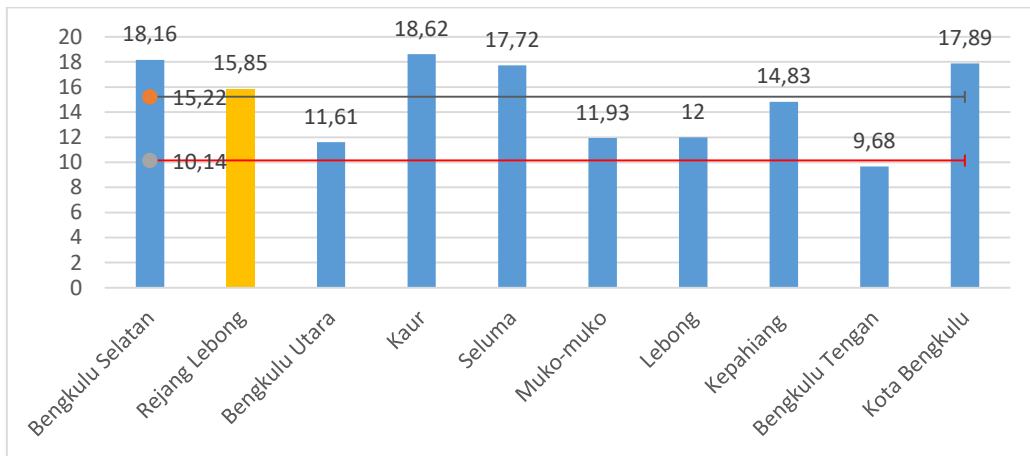
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebesar 15,85%, angka ini masih berada diatas rata-rata provinsi dan nasional sebesar 15,22% dan 10,14%. Rejang Lebong menduduki posisi ke-5 dari 10 Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma menduduki peringkat pertama dengan angka 18,72%, selanjutnya Kabupaten Kaur dengan angka 18,62%, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan angka 18,16% dan Kota Bengkulu 17,89%.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rejang Lebong
Se- Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/kota	Persentase Penduduk Miskin	
		Bulan Maret	
		2020	2021
1	Bengkulu Selatan	17,82	18,16
2	Rejang Lebong	15,85	15,85
3	Bengkulu Utara	11,67	11,61
4	Kaur	18,47	18,62
5	Seluma	18,56	17,72
6	Muko-muko	11,72	11,93
7	Lebong	11,85	12,00
8	Kepahiang	14,69	14,83
9	Bengkulu Tengan	9,30	9,68
10	Kota Bengkulu	17,65	17,89

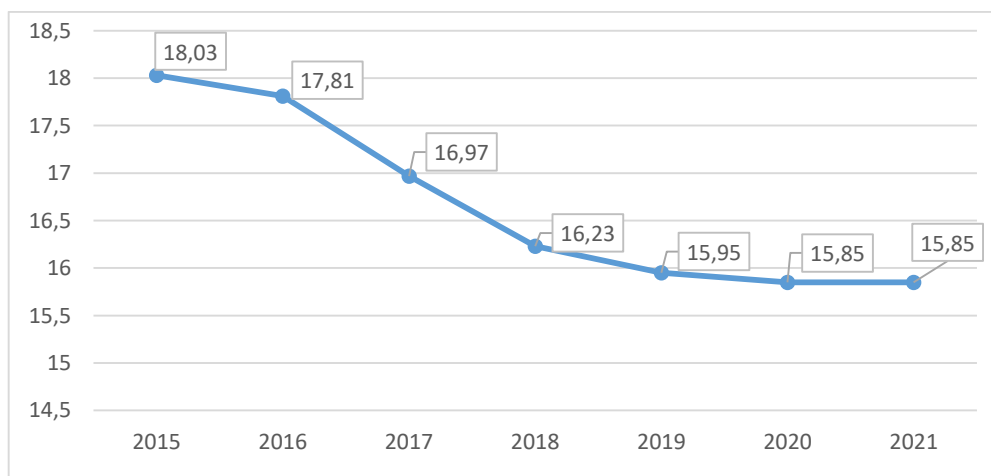
Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

Grafik 3.1
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Bengkulu
Bulan Maret 2021



Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

Grafik 3.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2021

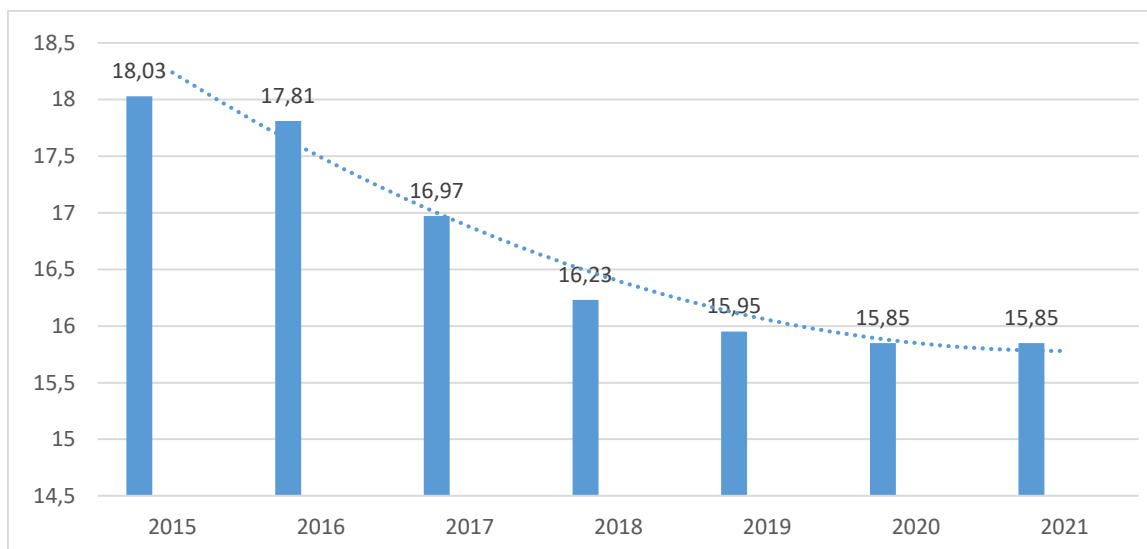


Sumber: Rejang Lebong angka, data diolah

Dilihat dari perkembangan antar waktu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong rentang waktu 2015-2021 konsisten mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong berada pada angka 18,03% dan pada tahun 2021 turun menjadi 15,85%.

Perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2015-2021 menunjukkan perbaikan dengan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan. Tingkat efektifitas penurunan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut:

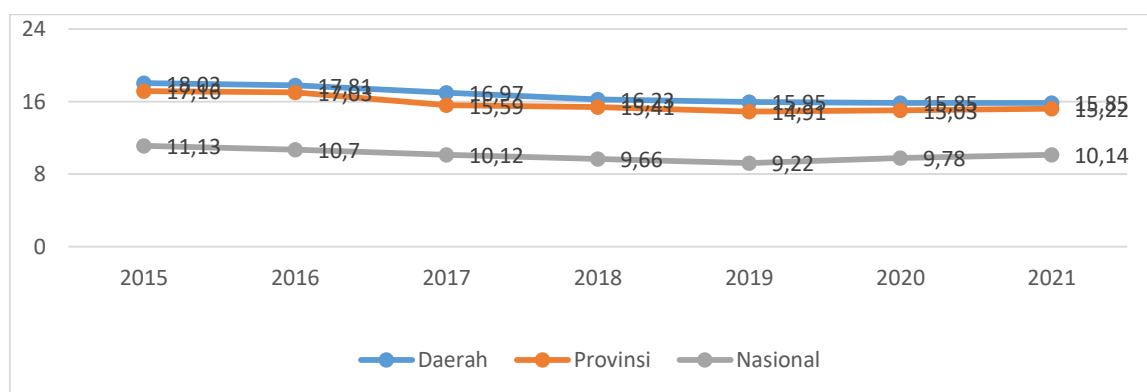
Grafik 3.3
Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2021



Sumber: Rejang Lebong angka, data diolah

Perkembangan relevansi persentase penduduk miskin Kabupaten Rejang Lebong selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) sejalan dengan capaian nasional dan provinsi, sebagaimana tersaji pada tabel grafik berikut:

Grafik 3.4
Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2021

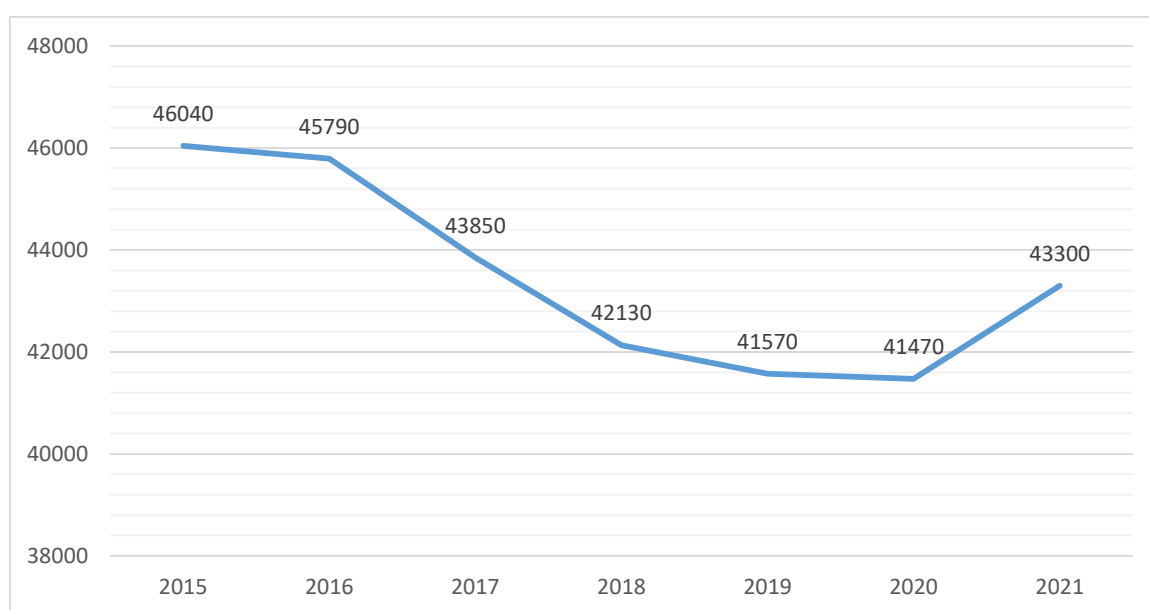


Sumber: Rejang Lebong dalam angka, Data diolah

3.2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 berjumlah 43.300 jiwa. Angka ini meningkat 1.830 Jiwa dari tahun 2020 yang berjumlah 41.470 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong menduduki peringkat ke-2, sedangkan Kota Bengkulu masih menduduki peringkat pertama se-provinsi Bengkulu.

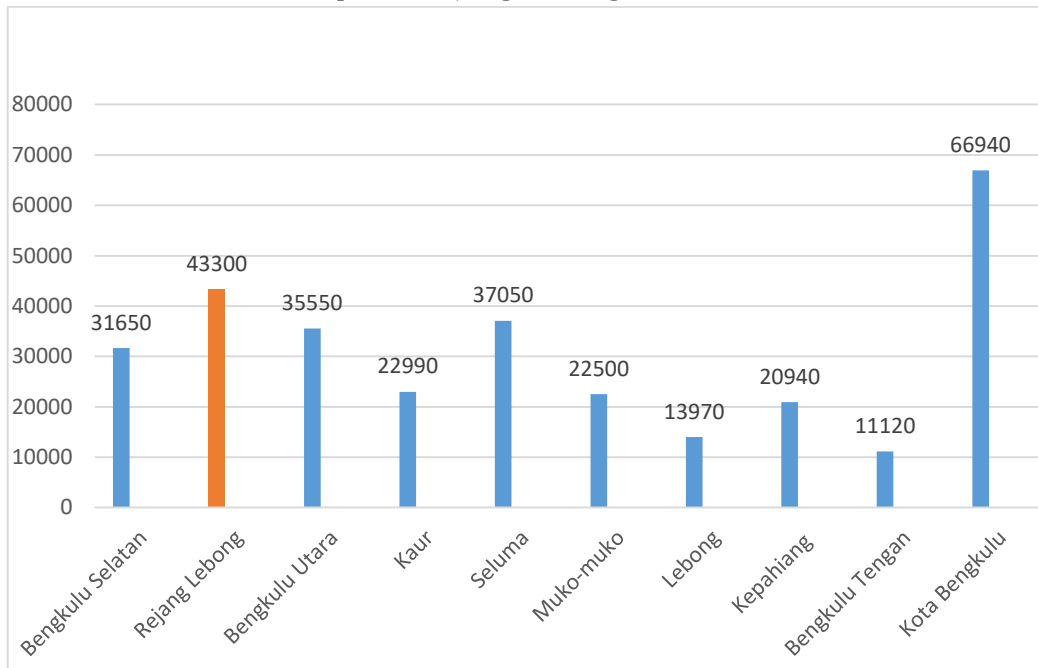
Grafik 3.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2015 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan, namun meningkat pada tahun 2021.

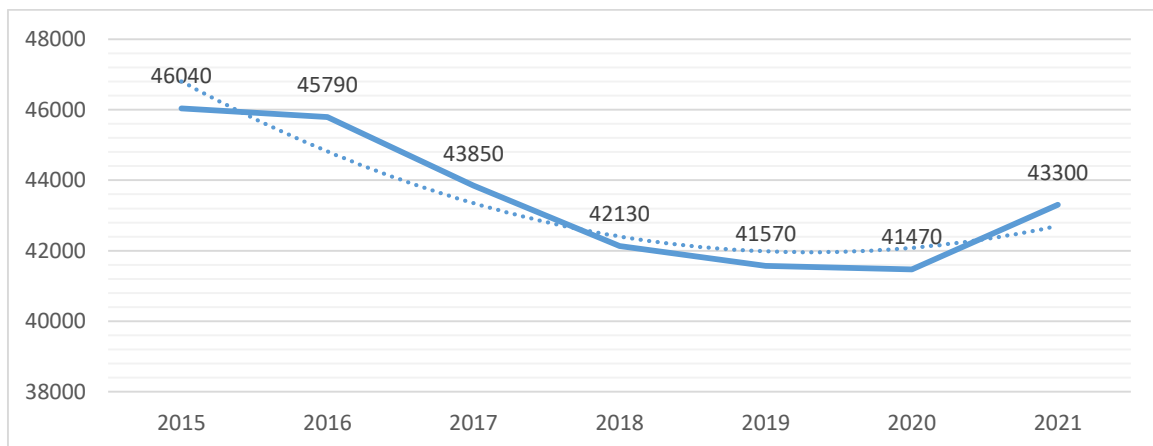
Grafik 3.6
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021



Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

Perkembangan efektivitas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2020 menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami percepatan, namun pada tahun 2021 menunjukkan perlambatan. Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada grafik berikut.

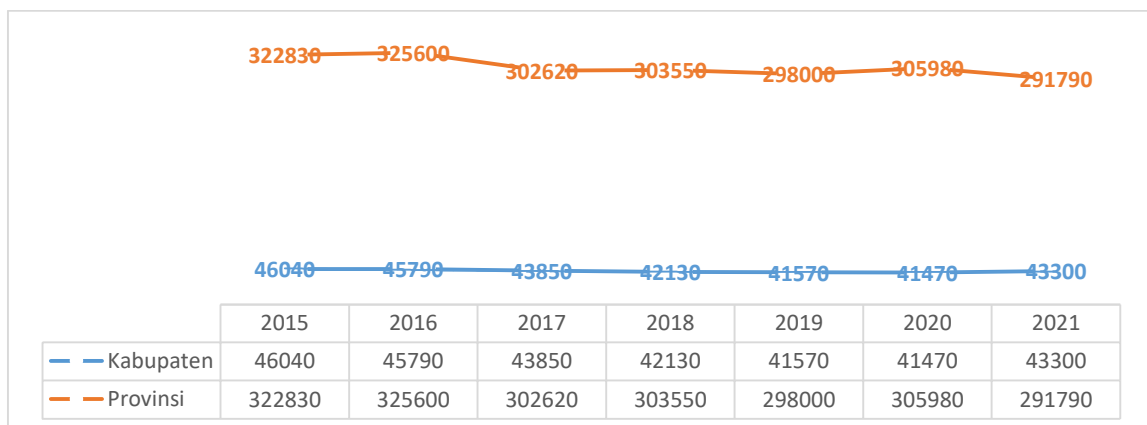
Grafik 3.7
Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2021



Sumber: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan relevansi jumlah penduduk miskin Kabupaten Rejang Lebong selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) tidak sejalan dengan penurunan capaian persentase penduduk miskin nasional dan provinsi, sebagaimana tersaji pada tabel grafik berikut.

Grafik 3.8
Perkembangan Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015-2021

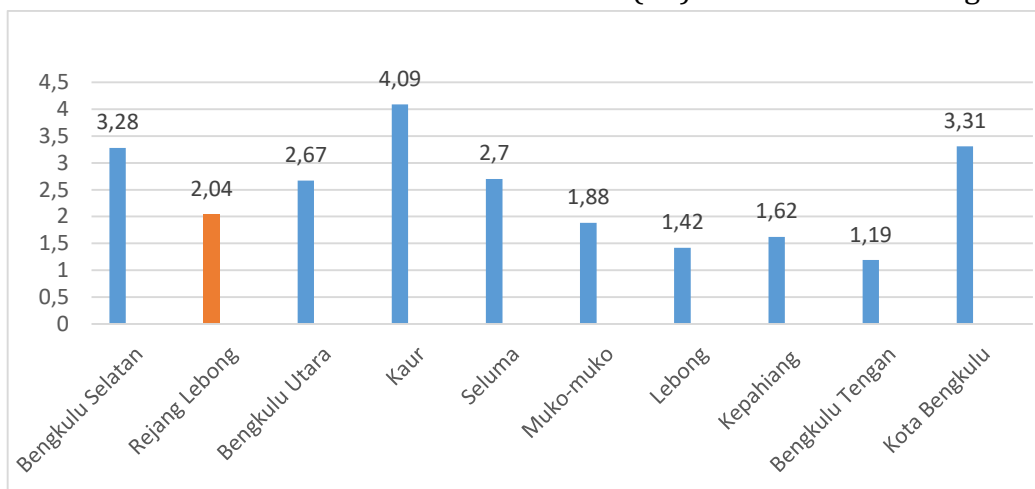


Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

3.2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 2,04 masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 1,67 namun lebih rendah dari provinsi Bengkulu sebesar 2,45. Untuk melihat posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten lainnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dalam Provinsi Bengkulu

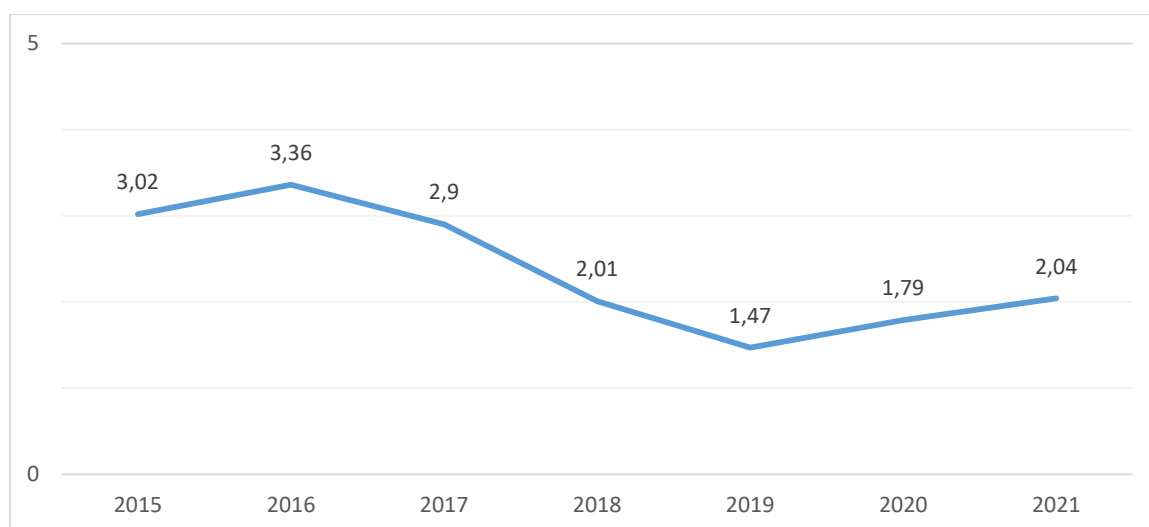


Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong berada pada urutan ke-5 tertinggi setelah Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Perkembangan efektivitas indek kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 menunjukkan perbaikan namun mengalami perlambatan, hal ini sebagaimana terlihat pada grafik 3.10.

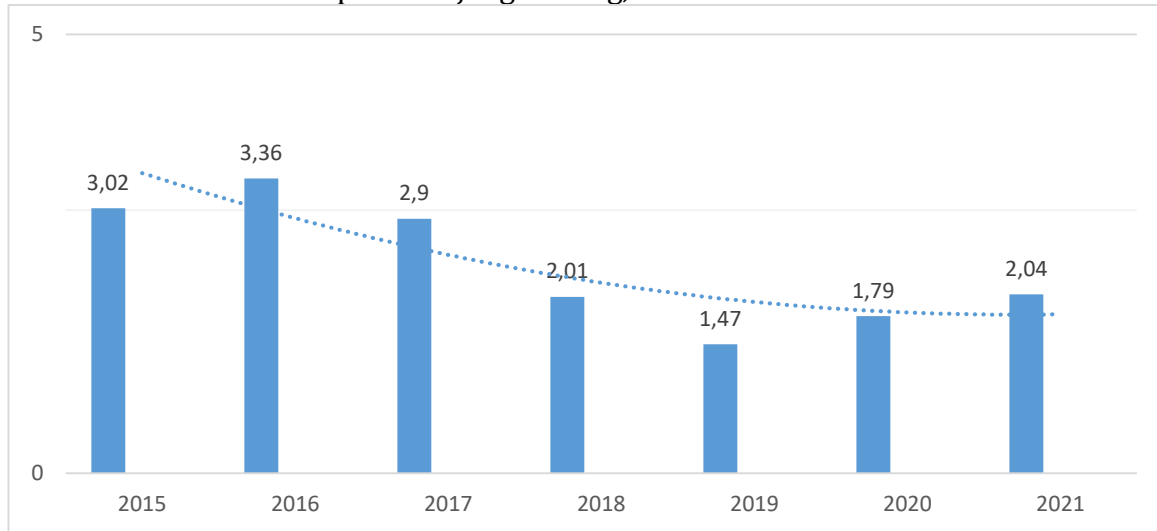
Grafik 3.10
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1)
Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2021



Sumber: Rejang lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan efektivitas kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami perlambatan.

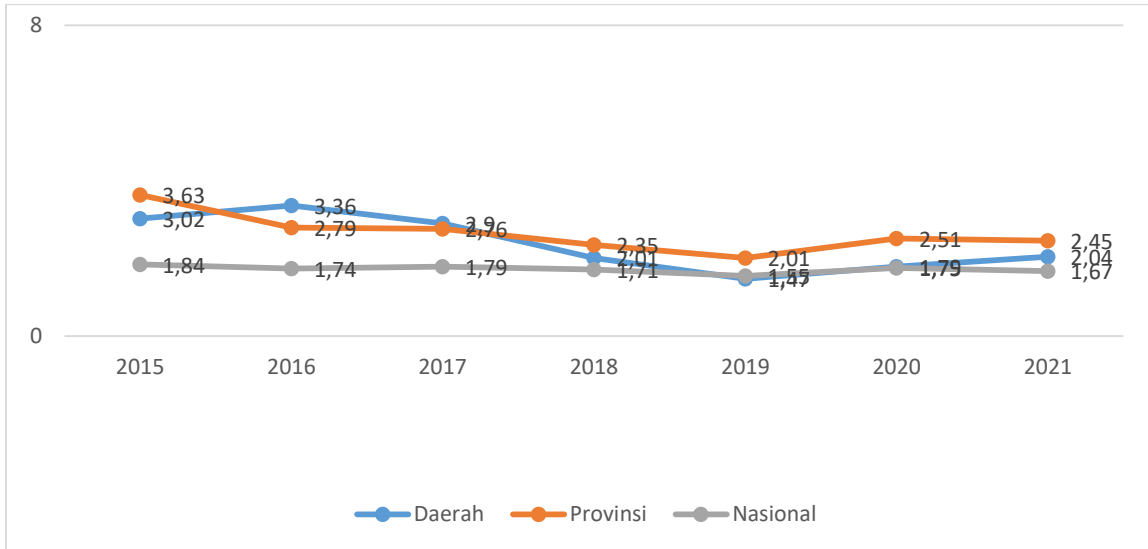
Grafik 3.11
Analisis Efektivitas indeks kedalaman kemiskinan (P1)
Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2021



Sumber: Rejang lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 sejalan terhadap perkembangan capaian nasional dan provinsi. Capaian Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah provinsi namun lebih tinggi dari capaian nasional.

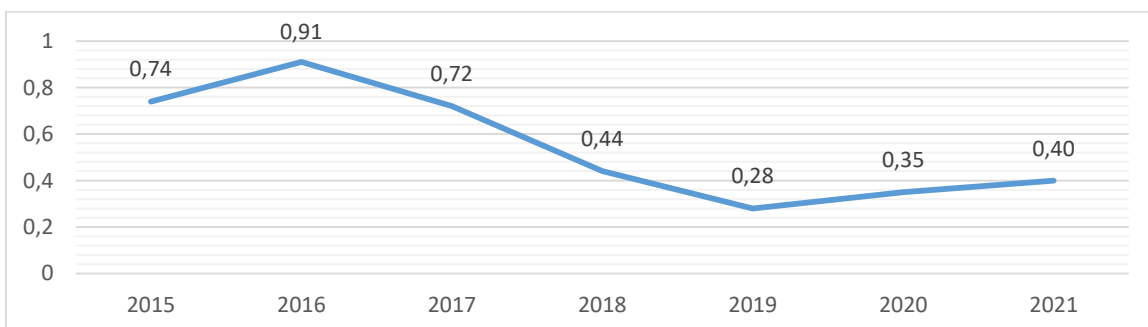
Grafik 3.12
Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2021



3.2.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan diantara penduduk miskin.

Grafik 3.13
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2021

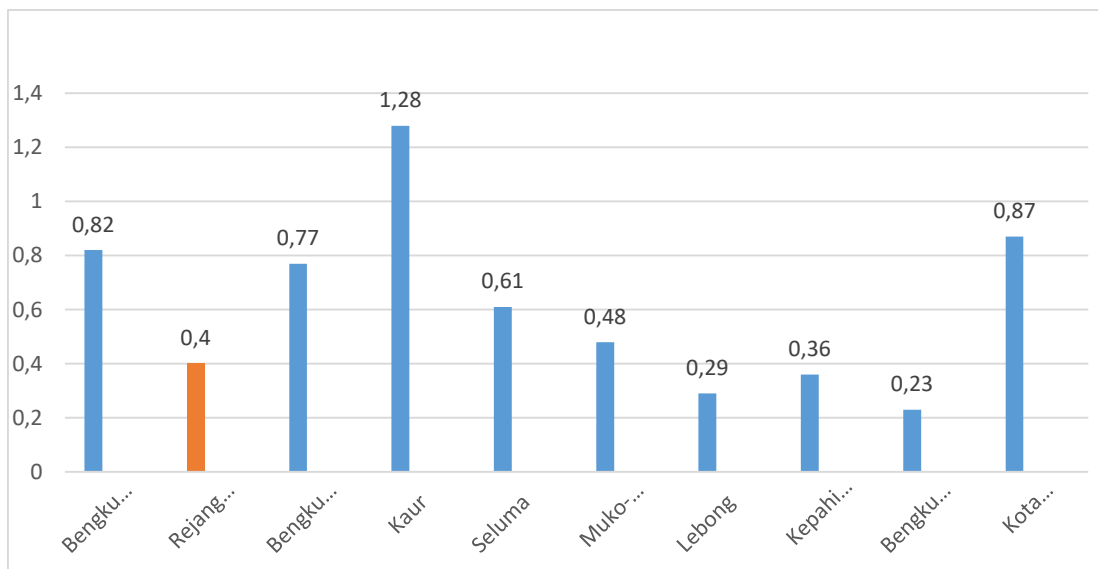


Sumber: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 mengalami fluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2016 sedangkan angka terendah dicapai pada tahun 2019.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong berada pada urutan ke-5 Se-Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara.

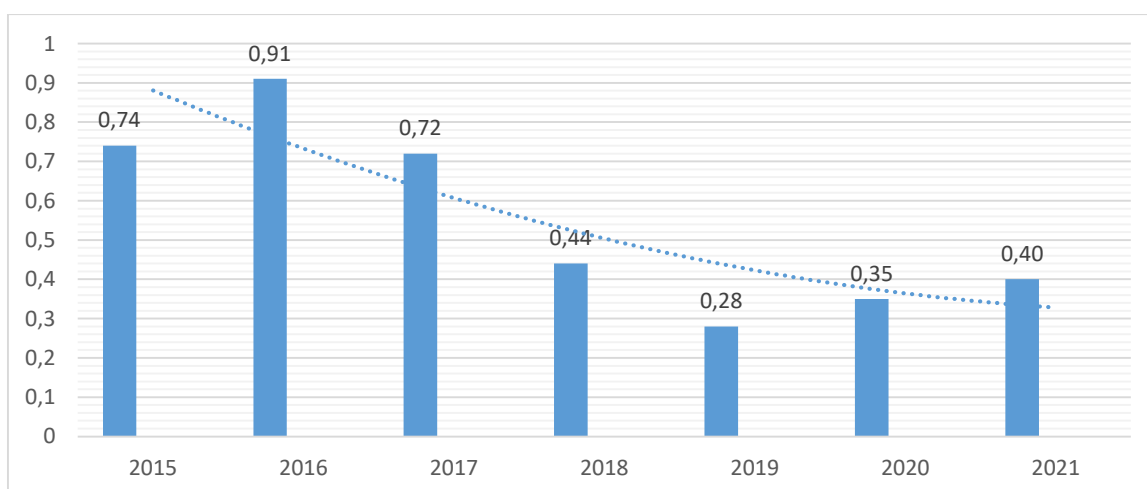
Grafik 3.14
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021



Sumber: Rejang lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 menunjukkan kinerja penurunan dengan perlambatan.

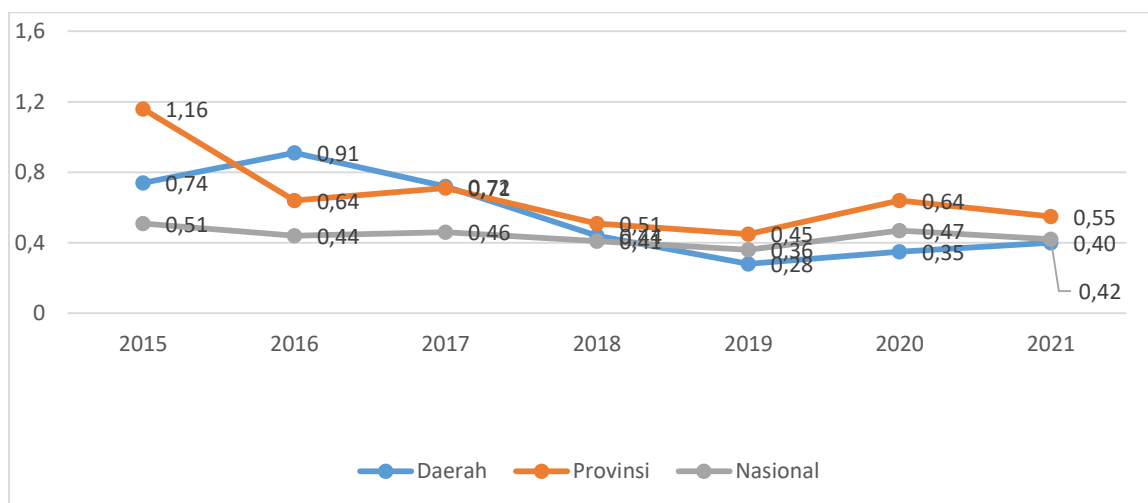
Grafik 3.15
Analisa Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2021



Sumber: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan relevansi indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong periode 2005-2021 sejalan dengan capaian nasional dan provinsi. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah nasional namun diatas capaian provinsi.

Grafik 3.16
Perkembangan Relevansi Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2021

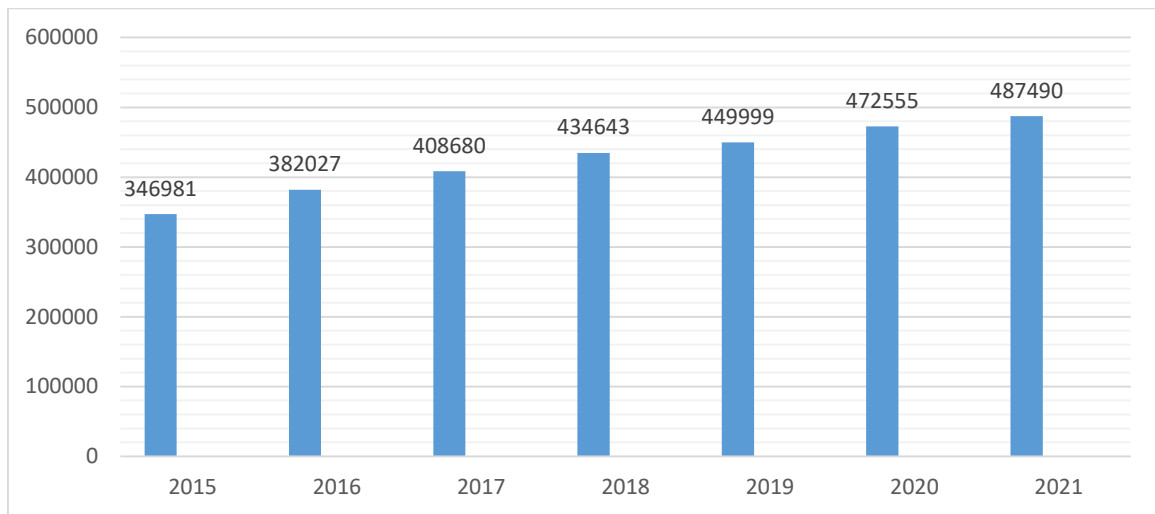


Sumber: Rejang Lebong dalam angka, data diolah

3.2.1.5 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Garis kemiskinan (Rp) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 487.490, angka ini lebih tinggi 14.935 dari tahun 2020 (472.555). perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong periode tahun 2015-2021 dapat dilihat pada grafik 3.17.

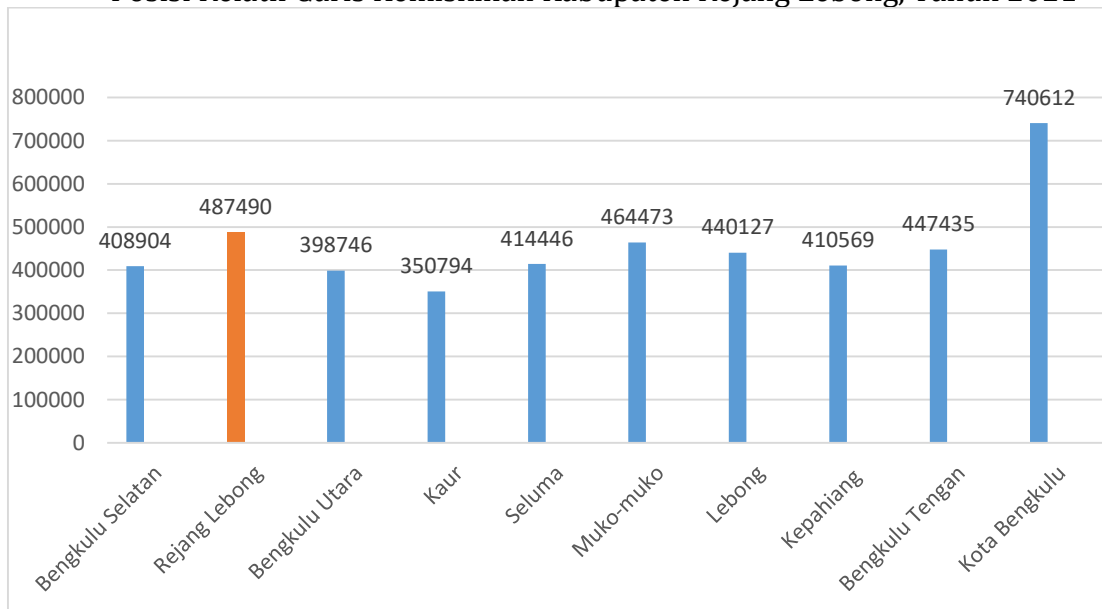
Grafik 3.17
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2021



Sumber: Rejang lebong dalam angka 2022, data diolah

Garis kemiskinan Kabupaten Rejang berada pada posisi kedua di Provinsi Bengkulu setelah kota Bengkulu. Posisi relatif Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.18.

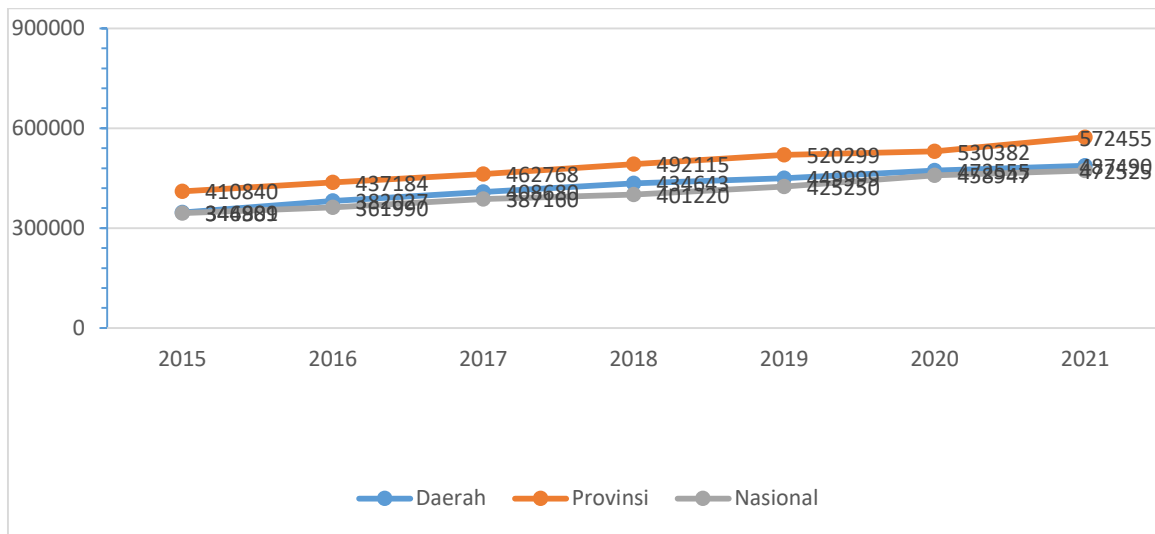
Grafik 3.18
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2021



Sumber: Rejang lebong dalam angka, data diolah

Perkembangan relevansi garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 sejalan dengan capaian nasional, hal ini dapat dilihat pada grafik 3.19.

Grafik 3.19
 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp)
 Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2021

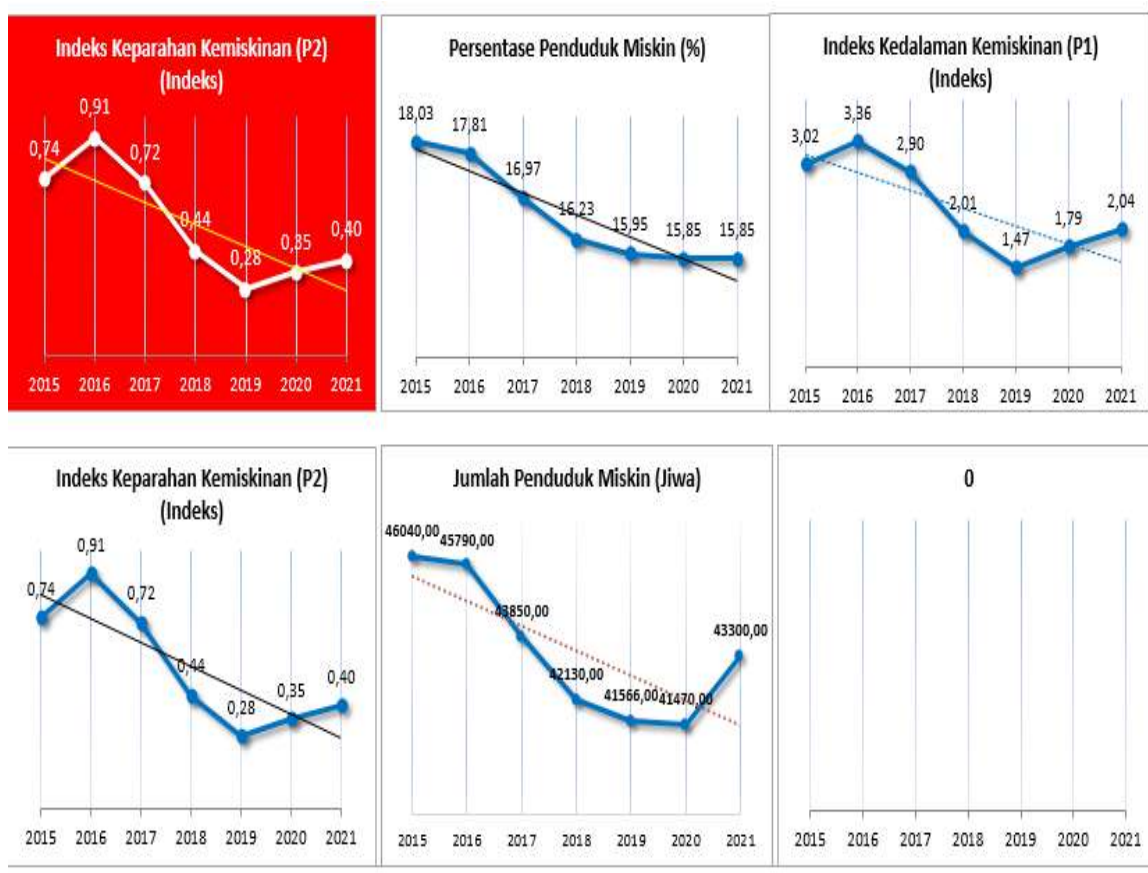


Sumber: Rejang lebong dalam angka, data diolah

3.2.2 Analisis Keterkaitan Kondisi Umum Kemiskinan Konsumsi

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 cenderung konsisten mambaik, yaitu pada tahun 2015 sebesar 18,03% menjadi 15,85% pada tahun 2021. Untuk mengetahui kontribusi dari capaian indikator kondisi umum kemiskinan lainnya terhadap persentase penurunan penduduk miskin dapat dilihat pada tabel pada grafik berikut:

Grafik 3.20
Analisis Prioritas Intervensi Bidang



Sumber: BPS, data diolah

Tabel 3.6
Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan Konsumsi
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2021

Indikator	Aspek				Keterkaitan
	Posisi relatif tahun terakhir	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi	
Persentase Penduduk miskin	Capaian indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong (15,85%) diatas provinsi (14,43%) dan nasional	Tingkat perkembangan kemiskinan selama 6 tahun terakhir cenderung menurun. Capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun 2020.	Perkembangan efektivitas persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2015-2021 menunjukkan perbaikan dengan	Perkembangan relevansi persentase penduduk miskin Kabupaten Rejang Lebong selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) sejalan dengan	Tingkat kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong tergolong

	(9,71%) dan menduduki urutan ke-4 di Provinsi Bengkulu		dengan tren kinerja penurunan mengalami percepatan	capaian nasional dan provinsi	masih tinggi dibanding dengan capaian Provinsi dan rata-rata nasional.
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	43.300 jiwa urutan ke ke-2 di provinsi bengkulu	Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2015 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan, namun meningkat pada tahun 2021	Perkembangan relevansi jumlah penduduk miskin Kabupaten Rejang Lebong selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) tidak relevan dengan penurunan capaian persentase penduduk miskin nasional dan provinsi	Perkembangan relevansi jumlah penduduk miskin Kabupaten Rejang Lebong selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) tidak sejalan dengan penurunan capaian persentase penduduk miskin nasional dan provinsi	
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Capaian Kabupaten Rejang Lebong (2,04) lebih rendah dari capaian provinsi (2,45) dan rata-rata nasional (1,67)	Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 2,04 masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 1,67 namun lebih rendah dari provinsi Bengkulu sebesar 2,45	Perkembangan efektivitas kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perbaikan dengan kinerja penurunan mengalami perlambatan	Perkembangan relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 sejalan terhadap perkembangan capaian nasional dan provinsi. Capaian Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah provinsi namun lebih tinggi dari capaian nasional.	

Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Capaian Kabupaten Rejang Lebong (0,4) lebih rendah dari provinsi (0,55) dan rata-rata nasional (0.42)	Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 mengalami fluktuasi, angka tertinggi berada pada tahun 2016 sedangkan angka terendah dicapai pada tahun 2019.	Perkembangan efektivitas Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong periode 2015-2021 menunjukkan kinerja penurunan dengan perlambatan	Perkembangan relevansi indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong periode 2005-2021 sejalan dengan capaian nasional dan provinsi. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah nasional namun diatas capaian provinsi.	
Garis Kemiskinan	Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong (487.490) rendah dari Provinsi Bengkulu (548.934)	Garis kemiskinan (Rp) Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sebesar 487.490, angka ini lebih tinggi 14.935 dari tahun 2020 (472.555)	Perkembangan efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong selama 7 tahun terakhir (2015-2021) menunjukkan perbaikan kenaikan mengalami percepatan	Capaian Garis Kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2015-2021 sejalan terhadap capaian provinsi dan nasional dengan capaian konsisten membaik	

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Kemiskinan Konsumsi pada tahun 2021

No	Indikator	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kabupaten
1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	9,71	14,43	15,85
2	Jumlah Penduduk Miskin	26.503.650	306.000	43.300
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,67	2,45	2,04
4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42	0,55	0,4
5	Garis Kemiskinan	486.168	548.934	487.490

Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka, data diolah

3.3 Analisis capaian penanggulangan kemiskinan 2021

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.8
 Capaian program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Tahun 2021	Target Kinerja		Sumber Dana			Uraian Kegiatan	OPD Pelaksana
			Anggaran	Target	Realisasi	D A K	D A U	D B H		
Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	300.000.000	2 SD	2 SD		√		Pemberian bantuan hibah ke sekolah swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.822.300.700	27 SD	27 SD	√	√		Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar, penyediaan media pembelajaran dan TIK	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	250.990.800	189 SD	189 SD	√	√		Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional, penerimaan siswa baru jenjang SD Negeri dan swasta	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	28.239.939.276	189 SD	189 SD	√	√		pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SD negeri dan swasta	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.154.396.200	5 SMP	5 SMP	√	√		Revitalisasi bangunan gedung sekolah dasar, penyediaan media pembelajaran dan TIK	

		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	175.849.250	54 SMP	54 SMP	√	√		Penyelenggaraan ujian sekolah/ujian nasional, penerimaan siswa baru jenjang SMP negeri dan swasta
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.406.605.808	54 SMP	54 SMP	√	√		pedampingan dan monitoring pengelolaan dana BOS tingkat SMP negeri dan swasta
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	60.000.000	2 PAUD	2 PAUD		√		Pemberian Bantuan Hibah PAUD
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	150.000.000	4092 siswa	3585 siswa		√		Pengadaan perlengkapan dasar bagi peserta didik PAUD (Buku dan alat mewarnai)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	454.488.980	300 Orang	300 Orang		√		Pemberian bantuan/ insentif bagi guru PAUD
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.511.203.200	123 TK/Paud	120 TK/Paud	√	√		Pendampingan dan monitoring pengelolaan BOP PAUD negeri dan swasta
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1.711.425.375	1 SKB	1 SKB	√	√		Pembangunan Saspras Nonformal/ kesetaraan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	207.331.220	1546 peserta didik	100 peserta didik	√	√		Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	73.709.350	Paket A:98 Paket B:402 Paket C:1160	Paket A:88 Paket B:396 Paket C:1160	√		Monitoring pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C	
		Pembinaan dan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.500.000.000	3 lembaga	3 lembaga	√	√	Pemberian Hibah Lembaga Pendidikan Nonformal/kesetaraan	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	544.380.000	8 Lembaga	8 Lembaga	√	√	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal/kesetaraan	
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	3.429.968.080	2 Unit	2 Unit	√		Pembangunan/ Rehabilitasi PKM	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.599.470.206	1 Unit	1 Unit	√		Pembangunan Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2.226.000.000	4 Unit	4 unit	√		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.120.000.000	4 Unit	4 Unit	√		Pengadaan IPAL	Dinas Kesehatan

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.432.608.604	1 Paket	1 Paket	√		Pengadaan Alkes	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Obat, Vaksin	1.361.932.476	1 Paket	1 Paket	√		Pengadaan Obat	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.249.724.768	1 Paket	1 Paket	√		Pengadaan BHP	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.621.452.000	AKI 21/100.000	AKI 206.2/100.000	√		Dukungan persalinan oleh tenaga kesehatan dan akomodasi Rumah Tunggu Kelahiran	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	600.000.000	1 organisasi	1 organisasi	√		Hibah kepada PMI	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5.919.100.000	12 bulan	12 bulan	√		Pelaksanaan Vaksinasi dan Penanganan COVID 19	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan	17.818.459.060	224514 org	49082 org	√		Pelayanan Jamkesda	Dinas Kesehatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	24.273.132.189	21 pkm	21 pkm	√		Pembiayaan Operasional Puskesmas	Dinas Kesehatan

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.637.500	200 org	200 org	√		Uji Kompetensi tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	45 sarana	45 sarana	√		Pengawasan PIRT	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.021.250	156 buah	156 buah	√		Pemeriksaan Produk PIRT	Dinas Kesehatan

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	Industri Rumah Tangga									
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.452.000	21 Puskesmas	21 Puskesmas	√			Bimbingan teknis keamanan makanan	
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	616.779.918	4 Kecamatan	4 Kecamatan	√			Pemberdayaan Kelompok Tani Wanita	Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	148.128.205	1 Unit	1 Unit	√			Pemeliharaan/ pembangunan Sarana Penunjang Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	126.923.945	padi: 100 Kg manggis: 50 btg	padi: 100 Kg manggis : 50 btg	√			Pengadaan Bibit Tanaman (padi, manggis, durian)	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			durian: 50 Btg	durian: 50 Btg				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	180.556.950	4000 bibit	4000 bibit		√		Pemberian bantuan bantuan, tanaman hortikultura dan sarana pendukung pertanian
Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	63.788.700	10 BPP	10 BPP		√		Penyuluhan pertanian
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	282.594.900	3 Jenis Hewan	3 Jenis Hewan		√		Pengawasan kesehatan hewan ternak
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	714.721.150				√		Pengadaan alat produksi ikan

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.046.747.792	2600 M	2547,48 M	√	√	Pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	799.705.800	1617 Org	1617 Org		√	Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.816.633.600	900 SR	900 SR		√	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.363.370.200	1500 SR	1500 SR	√	√	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	2.619.000.400	290 Unit	100%	√	√		Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman ditangani	
Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	874.787.468	4 Km	3,57 Km		√		Peningkatan kualitas Jalan Lingkungan	
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	23.944.082.435	60 Km	100%	√	√		Peningkatan Panjang jalan kabupaten	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.466.477.306	705 Km	100%	-	√		Pemeliharaan rutin jalan	
		Pembangunan Jembatan	2.893.777.557	80 M	48,70 %	-	√		Peningkatan kualitas bangunan jembatan	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	382.494.363	160 M	100%	-	√		Pemeliharaan rutin jembatan	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	156.235.600	1 Unit	1 Unit	√			Pemeliharaan rumah susun	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	8.310.891.475	422 Unit	398 Unit	√	√		Perbaikan RTLH	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	564.976.600	3 Unit	3 Unit	√			Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	49.028.800	1 Objek wisata	1 Objek wisata	√			Pemeliharaan Saspras objek wisata	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	89.784.000	1 Profil Pariwisata	1 Profil Pariwisata	√			Pembuatan profil pariwisata kabupaten (Cetak Bahan-bahan Promosi Pariwisata berupa booklet, Tas dll)	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintah Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerjasama antar desa	8.201.400	10 Bumdes	10 Bumdes	√	Pembinaan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	213.925.789	10.878 KK	10.596 KK	√	Monitoring tugas-tugas Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dalam menyalurkan bansos ke KPM	Dinas Sosial
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.605.000	10 Lembaga	123 lembaga	√	Monitoring pelaksanaan pembagian Bansos melalui BRILINK (123 BRILINK)	
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	5.233.100	20 Orang	9 Orang	√	Bimbingan dan pemberian bantuan dan pendampingan terhadap anak jalanan, orang terlantar, pengemis dan gelandangan	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	12.555.000	30 Orang	23 Orang	√	Pemberian layanan dan terhadap ODGJ, lansia terlantar, anak terlantar, pengemis dan gelandangan
		Pemberian Layanan Rujukan	4.080.000	20 Orang	12 Orang	√	Pemberian layanan rujukan terhadap ODGJ dan Orang terlantar ke RSJ BKL, Balai Darma Guna, Panti Tresnawerda
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68.384.150	1 Dokumen	1 Dokumen	√	Pemrian dana HIBAH ke LKS yang terdaftar ke Dinas Sosial (DWIN)
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.620.400	33.000 KK	30.461 KK	√	Verifikasi dan Validasi data keluarga miskin
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	8.010.000	25 KK	34 KK	√	Pemberian bantuan makanan kepada korban bencana alam dan bencana sosial

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.348.700	40 Orang	85 Orang	√		Penanganan terhadap kelompok rentan (anak, dan lansia) korban bencana alam dan bencana sosial	
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.960.000	50 UKM	50 UKM	√		pembinaan dan peningkatan kube (lansia dan Rt produktif	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	390.304.000	135 Kukm	135 Kukm	√		Sosialisasi UKM	
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	389.234.300	4 Pasar	4 pasar	√		Pengawasan PAD sektor pasar	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11.235.400	8 Pasar	8 Pasar	√			Monitoring ketersediaan barang di pasar	
Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1.588.008.700	1 Unit	1 Unit	√	√		Pembangunan gedung pengolahan gula aren	
Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.284.100	10 Kasus	2 Kasus	√			Penyelesaian hubungan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	335.100.790	2 Organisasi	2 Organisasi	√		Pembiayaan Operasional organisasi Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	192.046.000	472 kali	211 kali	√	√	Pengelolaan BOK KB	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.101.240.000	15 Balai KB	15 Balai KB	√	√	Operasional Balai Penyuluhan KB	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.705.820	200 Kali	96 kali	√	√	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota Ke Fasilitas Kesehatan/Klinik dan Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes	

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	253.375.180	60 kali	30 kali		√		Operasional Pergerakan Pelayanan KB
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.076.278.200	32 Unit	32 Unit	√	√		Pengadaan Sarana Tranportasi Kb Dan Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	361.829.250	1022 Kader	1022 Kader		√		Pemberian Honoradium kader PPKBD dan Sub PPKBD
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	760.560.000	194 Kegiatan	162 Kegiatan	√			Operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Di Kampung Kb

LP2KD

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Sosial telah berupaya memukhtahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan verifikasi dan validasi, namun dalam praktiknya dinilai belum optimal karena ditemui beberapa kendala seperti NIK kosong, double, kesalahan penulisan nama dan warga yang benar-benar miskin belum terdata. Untuk perbaikan data dimasa yang akan datang diperlukan PKS (perjanjian kerja sama) antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Belum adanya sekretariat layanan pengaduan masyarakat terkait kemiskinan, sehingga kedepannya perlu dibentuk sekretariat atau posko yang menangani pengaduan masyarakat.
3. Masih lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai karakteristik masalah.
4. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, LSM dan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga kedepannya diperlukan peningkatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rentang waktu 2016-2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong cenderung menurun, dari angka 18,03 persen di tahun 2015 menjadi 15,85 persen di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,12 persen per tahun.

Kemiskinan bersifat kompleks, sehingga perlu mendapat perhatian lintas sektor, baik dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, LSM dan unsur pendukung lainnya.

Anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari pemerintah pusat dan daerah (transfer dana alokasi umum, transfer DAK fisik dan non fisik), dana desa (bantuan BLT kepada masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting dan penyertaan BUMdes), CSR dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta peran serta dari berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.

5.2 Rekomendasi

No	OPD	Rekomendasi
1	Bappeda (Selaku Sekretariat TKPKD)	Koordinasi penanggulangan kemiskinan agar lebih ditingkatkan.
2	Pengelola Program (Asisten yang membidangi Kesra, Perekonomian dan Pembangunan)	Koordinasi program, kegiatan dan subkegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih ditingkatkan agar menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3	Dinas Sosial	Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan melibatkan pemerintah desa dalam rangka percepatan pemukhtahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

4	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Melakukan koordinasi dan menghimpun para pengusaha untuk memetakan kebutuhan lowongan pekerjaan dalam kegiatan Job Fair
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Desa yang berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DD dan ADD.

5.3 Saran

- a. Meningkatkan Kualitas dan Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah lintas sektor;
- b. Mengoptimalkan peran BAZNAS, Pemerintah Desa dan lembaga non pemerintah dalam upaya pengentasan masalah Kemiskinan;
- c. Melaksanakan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan melibatkan tim pendamping PKH dan pemerintah desa;
- d. Melaksanakan pendampingan dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes dalam rangka intervensi dan sinkronisasi program kemiskinan tingkat desa;